

KERUKUNAN MASYARAKAT MULTIKULTURAL PASCA KONTESTASI POLITIK IDENTITAS SAAT PILKADA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018

THE HARMONY OF MULTICULTURAL SOCIETIES IN THE NUANCES OF IDENTITY POLITICS POST 2018 GOVERNOR ELECTIONS WEST KALIMANTAN

Alif Alfi Syahrin

Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Bali, Indonesia
asyahrin@undiksha.ac.id

Fitri Noviani

Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Bali, Indonesia
fitrinoviani@undiksha.ac.id

Irwan Nur

Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Bali, Indonesia
irwannur@undiksha.ac.id

Muhammad Idris

Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Bali, Indonesia
muhammad@undiksha.ac.id



Copyright of Harmoni: The Research and Development Center for Guidance for Religious Societies and Religious Services of the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia

Abstract

Religious life Harmony is an ideal concept for multicultural societies to live together and work together. In 2018, during the governor election for West Kalimantan, identity politics were very strong in the multicultural society in Sintang Regency. The identity politics that spread can disrupt the harmony that has existed in a multicultural society in Sintang District. This paper aims to explain the harmony that already exists and is maintained in a multicultural society, even though identity politics is getting thicker in society. The approach used in this paper is a qualitative approach using the case study method. Collection techniques include observation, interviews, and documentation studies. The data analysis used is data condensation, data display, and conclusion drawing. The results of the study show that there is a link between the results of the 2018 Pilkada votes and the religious similarity factor in Sintang District. Harmony in a multicultural society is maintained in the form of cooperation, mutual help, and gathering activities. The background factors for maintaining harmony in a multicultural society are the existence of the principle of mutual benefit, familiarity between community groups, and the role of ethnic organizations. The conclusion of this study is that identity politics normally, however, should not be used as the main strategy in the public sphere. So, the event of the governor election didn't create disruption in religious life. That way, the harmony that has been established will not be disturbed by political strategy based on identity.

Keywords: *Harmony, Multicultural, Identity Politics, Pilkada*

Abstrak

Kerukunan menjadi konsep yang ideal bagi masyarakat multikultural untuk menjalani kehidupan bersama dan melakukan kerja sama. Pada penyelenggaraan Pilkada Gubernur Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018, nuansa politik identitas begitu kental dalam masyarakat multikultural di Kabupaten Sintang. Kentalnya politik identitas yang merebak dalam kehidupan masyarakat multikultural dapat mengganggu kerukunan yang sudah terjalin pada masyarakat multikultural di Kabupaten Sintang. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan jalinan kerukunan yang sudah ada dan tetap terjaga dalam masyarakat multikultural walaupun semakin kentalnya politik identitas dalam kalangan masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu kondensasi data, *display* data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara hasil perolehan suara Pilkada tahun 2018 dengan faktor kesamaan agama di Kabupaten Sintang, kerukunan dalam masyarakat multikultural tetap terjaga dalam bentuk adanya aktivitas gotong-royong, tolong menolong dan kumpul bersama. Faktor-faktor yang melatarbelakangi tetap terjalin kerukunan dalam masyarakat multikultural yaitu adanya asas kebermanfaatn bersama, sudah saling mengenalnya antar kelompok masyarakat dan adanya peran organisasi kesukuan. Kesimpulan bahwa politik identitas dianggap sebagai suatu keniscayaan dalam kehidupan, namun hal tersebut tidak diumbar di khalayak umum agar tidak melahirkan perpecahan dalam keberagaman. Dengan begitu, kerukunan yang sudah terjalin menjadi tidak terganggu dengan adanya pilihan politik berdasarkan identitas.

Kata kunci: Kerukunan, Multikultural, Politik Identitas, Pilkada

PENDAHULUAN

Kerukunan dalam bingkai keragaman etnis maupun umat beragama menjadi sebuah kebutuhan dalam setiap kalangan masyarakat. Merujuk akan keberagaman identitas secara umum sering diistilahkan sebagai masyarakat multikultural. Seperti yang diungkapkan oleh Yani (2019) bahwa masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang terdiri dari berbagai unsur, baik itu suku, ras, agama, pendidikan, ekonomi, politik, bahasa dan lain-lain yang hidup dalam suatu masyarakat dan mempunyai satu pemerintahan namun secara kesatuan utuh tidak dapat dipersatukan.

Istilah kerukunan sering diidentikkan dengan suasana kehidupan damai dan situasi kondusif untuk dilakukannya kerja sama antar individu maupun kelompok. Namun, jika dipahami secara mendalam bahwa kerukunan tidak sebatas mengidentifikasi hidup yang damai, tetapi adanya kesediaan untuk menerima segala macam perbedaan yang diyakini oleh masing-masing masyarakat (Rusydi & Zolehah, 2018). Sehingga dapat dikatakan kerukunan sebagai konsep ideal yang dibutuhkan dalam masyarakat multikultural. Hal ini senada dengan tujuan kerukunan bagi masyarakat yaitu untuk memanusiakan manusia sehingga mampu membedakan antara benar dan salah dan juga antara baik dan buruk (Lubis, 2020).

Berakhirnya pemerintahan Orde Baru memberikan angin segar terhadap demokrasi Indonesia. Salah satunya terbukanya ruang demokratisasi yang

memberikan ruang bagi manuver elit politik di tingkat nasional maupun tingkat regional dan lokal (Tanasaldy, 2012). Pada tingkat lokal, munculnya sistem desentralisasi setelah runtuhnya rezim Orde Baru pada akhir 1990an memberikan Pemerintah di berbagai macam daerah dapat memilikikewenangan dan otonomi dalam mengurus urusan daerah (Talitha, Firman, & Hudalah, 2020). Kewenangan mengurus daerah diimplementasikan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), baik tingkat provinsi hingga kabupaten maupun kota.

Akhir-akhir ini wajah perpolitikan Indonesia khususnya pada perhelatan politik di daerah kerap diterpa dengan berbagai macam isu seperti politik identitas. Hal ini merupakan dampak dari penerapan sistem demokrasi secara langsung dalam perhelatan Pilkada. Politik identitas (etnis maupun agama) menjadi bagian tak terhindarkan dari politik kontemporer seperti penggunaan etnis dan sentimen keagamaan telah menjadi bagian integral di tingkat nasional, lokal maupun pemilihan legislatif (Qodir, Jubba, & Hidayati, 2022). Tren politik identitas dapat ditelusuri berdasarkan ungkapan Huntington (1996) bahwa pasca runtuhnya Uni Soviet telah terjadi pergeseran potensi konflik yang pada awalnya berdasarkan ideologi berubah menjadi identitas, seperti dalam politik global akan terjadi perubahan yang ditandai dengan kebangkitan *politics of civilization*, sedangkan dalam politik domestik muncul kebangkitan *politics of ethnicity*.

Menurut Manuel Castells (dalam Buchari, 2014) bahwa politik identitas merupakan keikutsertaan seseorang dalam partisipasi politik yang lebih berdasarkan oleh budaya dan psikologis seseorang. Begitu juga menurut Hanan (2020) bahwa politik identitas adalah pemanfaatan identitas apapun oleh orang atau kelompok terhadap mereka lawan dalam upaya memenangkan persaingan kekuasaan politik. Identitas yang melekat dalam diri seseorang dapat menjadi pertimbangan masyarakat sebagai partisipasi politik dalam memberikan suara. Politik demokratis pun mengakui otonomi relatif warga, berupa kebebasan mereka untuk memilih (Suryadi, 2017). Sehingga secara tidak langsung, sistem demokrasi memberikan ruang untuk berkembangnya politik identitas pada partisipan politik, hal ini semakin diperparah dengan adanya penggunaan isu identitas pada masa kampanye pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di berbagai macam daerah yang cenderung heterogen. Banyaknya aktor-aktor yang dominan melihat identitas lokal sebagai alat untuk melakukan mobilisasi dukungan massa untuk melanggengkan kekuasaan (Zulfauzan, 2020).

Pilkada Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 merupakan bagian agenda Pilkada serentak yang dilakukan pada 17 Provinsi, 115 Kabupaten dan 39 Kota pada 27 Juni 2018. Pada perhelatan tersebut, diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu pasangan nomor urut yakni 1 (satu) Milton Crosby dan Boyman Harun, pasangan nomor urut 2 (dua) yakni Karolin Margaret Natasha dan Suryadman Gidot dan pasangan nomor urut 3 (tiga) yakni Sutarmidji dan Ria Norsan. Pilkada Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018

merupakan lanjutan dari ajang pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang telah dilaksanakan 2 (dua) periode sebelumnya pada tahun 2007 dan tahun 2012. Secara umum, pemilihan gubernur secara langsung di Provinsi Kalimantan Barat telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali.

Provinsi Kalimantan Barat didiami oleh berbagai macam etnis maupun agama, begitu juga di Kabupaten Sintang. Terdapat tiga etnis terbesar yang mendiami daerah Provinsi Kalimantan Barat yakni etnis Dayak, etnis Melayu dan etnis Tionghoa. Ketiganya tersebar di seluruh penjuru Kalimantan Barat, misalnya etnis Dayak mendiami daerah pedesaan atau pedalaman, etnis Melayu menempati daerah pesisir seperti Kabupaten Sambas, Singkawang, Pontianak serta daerah tepian sungai Kapuas, sedangkan etnis Tionghoa banyak terkonsentrasi di daerah perkotaan serta etnis lainnya seperti Jawa, Bugis, Madura dan sebagainya sebagian mendiami daerah perkotaan atau daerah lokasi transmigrasi (Sada, Alas, & Anshari, 2019). Keragaman etnis telah lama dikaitkan dengan konsekuensi sosial yang merugikan mulai dari sosial yang lebih lemah sehingga menjadi modal konflik yang lebih besar (Bazzi & Gudgeon, 2021). Begitu juga di Provinsi Kalimantan Barat memiliki sejarah kalam konflik antar etnis sehingga berbagai macam isu-isu identitas begitu sensitif. Sejak tahun 1950 an hingga tahun 1999 telah terjadi konflik etnis di Provinsi Kalimantan Barat (Davidson, 2008; Tanasaldy, 2012).

Berlangsungnya pelaksanaan Pilkada memberikan semacam angin segar bagi masyarakat di daerah untuk dapat memilih secara langsung calon Kepala Daerahnya masing-masing. Namun, kendati demikian ketika pemahaman politik masyarakat di daerah dipertemukan dengan ego primordial setiap kelompok maka tidak jarang akan melahirkan persaingan politik berbau SARA. Ego primordial dimunculkan dengan mobilisasi politik kelompok masyarakat dengan berbagai macam seruan, ajakan dan doktrinisasi yang mengarah pada fanatisme kelompok. Memunculkan semangat kedaerahan dan kesukuan sehingga melahirkan fenomena politik identitas yang menjadikan etnis dan agama menjadi bahan pertimbangan dalam partisipasi politik (Hasanah, 2018).

Tulisan ini hendak mengangkat penggunaan isu identitas di Provinsi Kalimantan Barat dalam bentuk etnis dan agama menjadi sebuah hal yang lazim dilakukan ketika memasuki masa-masa kampanye politik. Pada penyelenggaraan Pilkada Gubernur tahun 2018, Provinsi Kalimantan Barat termasuk kedalam tiga kategori kerawanan tertinggi bersama Provinsi Papua dan Provinsi Maluku. Penyebab tingkat kerawanan tinggi pada Pilkada Gubernur Provinsi Kalimantan Barat dikarenakan berbagai macam isu SARA (Gerintya, 2018). Fenomena politik identitas di Provinsi Kalimantan Barat dapat ditelusuri sejak diberlakukannya Pilkada secara langsung pada tahun 2007. Pada Pilkada Provinsi Kalimantan Barat tahun 2007, isu kebangkitan etnis berhasil menjadi faktor yang mempengaruhi hasil Pemilihan Gubernur Kalimantan Barat tahun 2007 (Hasanah, 2018). Etnis Dayak sejatinya bukan hanya ingin memperebutkan kekuasaan belaka, akan

tetapi ada tujuan yang lebih besar yang sedang diperjuangkan oleh etnis Dayak untuk mengejar ketertinggalan, keterpinggiran, serta ketertindasan yang telah diterimanya selama puluhan tahun lamanya (Buchari, 2014).

Begitu juga pada Pilkada Gubernur tahun 2018, antar kelompok masyarakat terbagi menjadi dua kelompok antar etnis Dayak dan etnis Melayu atau antara umat Islam dan umat Katolik maupun Kristen, terlibat dalam suatu persaingan politik guna memenangkan setiap pasangan calon (Syahrin, Suryadi, & Komariah, 2019). Ketiga pasangan calon berlatar belakang dari berbagai macam etnis terutama etnis-etnis mayoritas di Provinsi Kalimantan Barat seperti pasangan nomor urut 1 (satu) merupakan koalisi dari perwakilan antar etnis Dayak dan etnis Melayu, pasangan nomor urut 2 (dua) merupakan pasangan berlatar belakang dari etnis Dayak dan pasangan nomor 3 (tiga) merupakan pasangan berlatar belakang etnis Melayu. Dapat dikatakan pada Pilkada Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 cenderung dapat memecah belah dikarenakan setiap kontestan mewakili setiap kelompok etnis dan agama dalam persaingan lokal seperti Muslim Melayu dan Dayak Katolik atau Kristen (Setijadi, 2018).

Pasca Pilkada Gubernur Provinsi Kalimantan Barat melahirkan berbagai macam dinamika politik seperti politisasi etnis pada birokrasi. Semenjak pasca Pilkada 2007 dan 2012 kental dengan aroma etnisitas dalam promosi jabatan OPD Pemprov Kalbar (Rusdiono, Patriani, & Padilah, 2022). Sedangkan pasca Pilkada Kalbar tahun 2018 dengan mengedepankan lelang jabatan dengan sistem terbuka dan terukur (Rusdiono dkk., 2022). Namun, dalam kehidupan sosial masyarakat pasca Pilkada Kalbar tahun 2018, isu primordial tidak serta merta merasuki dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sosial masih berjalan dengan semestinya, tanpa ada gesekan yang berarti.

Tulisan mengenai politik identitas di Provinsi Kalimantan Barat telah banyak mengungkapkan berbagai macam fenomena dan dinamika yang terjadi dalam masyarakat multikultural. Seperti dalam tulisan Taufiq Tanasaldy (2007) yang mengungkapkan sepak terjang fenomena politik identitas di Provinsi Kalimantan Barat yang berjudul "Ethnic identity politics in West Kalimantan" bahwa sejak tahun 1999 politik etnis semakin meningkat antar etnis Dayak dan etnis Melayu namun belum mengakibatkan kekerasan antar kedua etnis tersebut. Lebih lanjut dikatakan bahwa identitas etnis akan selalu melekat dalam perpolitikan di Provinsi Kalimantan Barat tetapi dengan cara damai dikarenakan bagian dari praktik demokrasi masyarakat sipil di Provinsi Kalimantan Barat.

Tulisan selanjutnya mengenai "Upaya Rekonsiliasi Politik Identitas Pasca Pelaksanaan Pemilu 2019 di Indonesia" oleh Anifatul Kiftiyah (2019) bahwa dalam masyarakat plural terdapat anggapan yang mengatakan bahwa politik identitas adalah sesuatu yang wajar, namun akan muncul permasalahan jika terdapat diskriminasi terhadap kelompok tertentu, sehingga perlu adanya peran dari tokoh masyarakat maupun tokoh agama dalam membentuk pola pikir masyarakat agar tidak mengarah pada situasi disintegrasi.

Dengan adanya keberagaman etnis maupun agama di Kabupaten Sintang mencirikan bahwa penduduk di Kabupaten Sintang bersifat heterogen. Keberagaman tersebut tentunya menarik dalam konteks hubungan sosial antar masyarakat di tengah semakin kentalnya politik identitas dalam perpolitikan daerah. Tulisan ini berusaha menjelaskan bagaimana kerukunan dapat terjadi dan terjaga dalam masyarakat multikultural pasca Pilkada Gubernur tahun 2018 di Kabupaten Sintang mengingat pada perhelatan Pilkada berlangsung dari masa kampanye hingga penghitungan suara berbagai macam isu SARA begitu kental di tengah masyarakat. Untuk lebih memperdalam hasil kajian tulisan kali ini, maka disajikan hubungan keberagaman identitas dalam masyarakat terhadap dinamika hasil perolehan suara Pilkada Gubernur tahun 2018 di Kabupaten Sintang, berbagai macam bentuk aktivitas masyarakat multikultural yang merepresentasikan sebuah kerukunan dan berbagai macam faktor-faktor yang melandasi kerukunan masyarakat pasca Pilkada Gubernur tahun 2018. Tulisan ini menawarkan kebaruan berupa pembahasan mengenai kerukunan masyarakat multikultural sebagai suatu realitas yang tetap terjaga ditengah maraknya berbagai macam isu SARA dalam perhelatan politik daerah yang menghasilkan persaingan politik berlatar belakang identitas. Dengan demikian kerukunan yang sudah terjalin diharapkan mampu mencegah berbagai macam isu-isu perpecahan serta gesekan-gesekan yang dapat berujung konflik dan kekerasan antar setiap kelompok masyarakat.

METODE

Dalam proses pengumpulan data, tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat naturalistik dan berhubungan dengan data nonnumerik yang berusaha untuk memahami dan mengeksplorasi daripada menjelaskan dan memanipulasi variable (Nassaji, 2020). Untuk mengupas hasil penelitian menjadi lebih detail, maka tulisan ini menggunakan metode kasus dikarenakan dapat memusatkan penyelidikan pada subjek tertentu atau suatu peristiwa dalam konteks dunia nyata (Rashid, Rashid, Warraich, Sabir, & Waseem, 2019).

Pada metode kualitatif umumnya menggunakan teknik wawancara individu maupun kelompok (FGD) teknik observasi partisipan, teknik etnografi dan pendekatan lainnya (Hamilton & Finley, 2019). Penggunaan teknik pengumpulan data dalam tulisan ini yaitu teknik observasi, teknik wawancara dan studi dokumentasi. Teknik observasi dilakukan secara partisipan. Peneliti melakukan observasi secara langsung di lapangan guna mendapatkan data yang akurat. Observasi secara partisipan dilakukan di beberapa wilayah yang bersifat heterogen secara sosial budaya di Kabupaten Sintang seperti Kecamatan Sintang, Kecamatan Sungai Tebelian, Kecamatan Kelam Permai dan Kecamatan Dedai.

Dalam proses wawancara kepada informan dilakukan secara wawancara terstruktur. Informan dalam tulisan ini meliputi masyarakat lintas etnis yang

mendiami berbagai macam daerah di Kabupaten Sintang seperti masyarakat etnis Dayak, etnis Melayu, etnis Jawa dan etnis Tionghoa dengan pertimbangan bahwa keempat kelompok etnis tersebut merupakan kelompok etnis terbesar dalam segi jumlah serta memiliki basis massa politik di Kabupaten Sintang. Untuk memperdalam data hasil wawancara, peneliti juga melakukan wawancara kepada setiap tokoh masyarakat berdasarkan organisasi kesukuan di Kabupaten Sintang seperti Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Sintang, Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kabupaten Sintang, Pusat Paguyuban Warga Jawa (Puspawaja) Kabupaten Sintang, dan Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT) Kabupaten Sintang dan beberapa pejabat di Kabupaten Sintang.

Studi dokumentasi digunakan untuk memperdalam dan memperjelas berdasarkan dari data temuan hasil observasi dan hasil wawancara berdasarkan dari berbagai macam buku, artikel ilmiah maupun berita online terkait dengan penyelenggaraan Pilkada Gubernur Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018, keberagaman masyarakat di Kalimantan Barat maupun Sintang serta berbagai macam dokumen yang berisikan data mengenai komposisi agama masyarakat Sintang yang diperoleh dari Kementerian Agama Sintang, data mengenai hasil perolehan suara Pilkada Gubernur diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum Sintang dan data mengenai organisasi kesukuan yang ada di Kabupaten Sintang diperoleh dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbanpol) Sintang. Sedangkan data dalam bentuk laporan penelitian maupun berita terkait dengan penelitian kali ini didapatkan dari internet.

Analisis data yang digunakan dalam tulisan ini yaitu kondensasi data, display data dan penarikan kesimpulan. Hal ini untuk memudahkan dalam menyusun serta menganalisis berbagai macam data temuan. Dan peneliti juga menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data guna memastikan ketepatan data dan sesuai dengan indikator penelitian dengan melakukan perpanjangan pengamatan, triangulasi sumber data dan triangulasi teknik.

Penelitian ini dilakukan sejak bulan Maret hingga Mei 2019 (wawancara informan). Namun, dalam proses observasi dilakukan sejak tahun 2017 hingga tahun 2019, mengingat upaya peneliti dalam mendeskripsikan suasana dan kondisi pra Pilkada hingga pasca Pilkada Kalimantan Barat tahun 2018 serta hasil temuan terbaru pada tahun 2022 bertambahnya organisasi kesukuan pada daftar organisasi kesukuan yang ada di Kabupaten Sintang.

PEMBAHASAN

Keberagaman Identitas di Kabupaten Sintang

Sintang merupakan satu dari 14 kabupaten dan kota yang berada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Sintang terbagi menjadi 14 kecamatan, yaitu Sintang, Tempunak, Sepauk, Ketungau Hilir, Ketungau Tengah, Ketungau Hulu,

Dedai, Kayan Hilir, Kayan Hulu, Serawai, Ambalau, Kelam Permai, Sungai Tebelian dan Binjai Hulu. Dari 14 kecamatan tersebut, didiami oleh masyarakat multikultural dari segi etnis, agama, budaya, bahasa maupun adat. Berikut komposisi agama masyarakat di Kabupaten Sintang pada tahun 2018.

Tabel 1. Data Komposisi Agama Penduduk Kabupaten Sintang Tahun 2018

No	Kecamatan	Islam	Katolik	Kristen	Hindu	Budha	Konghucu	Lain-klain
1	Sintang	50.423	6.537	12.009	33	1.850	274	2
2	Tempunak	12.132	5.058	13.058	52	11	8	3
3	Sepauk	19.241	12.369	24.119	6	210	30	0
4	Ketungau Hilir	2.566	9.657	9.513	1	0	1	0
5	Ketungau Tengah	1.416	12.239	11.473	0	6	4	0
6	Ketungau Hulu	2.036	11.742	6.729	0	0	0	0
7	Dedai	15.721	2.013	10.756	28	24	0	0
8	Kayan Hilir	2.875	12.256	14.452	2	20	1	0
9	Kayan Hulu	2.714	12.257	6.263	2	3	12	2
10	Serawai	6.777	4.667	14.963	9	184	4	0
11	Ambalau	649	5.554	10.768	5	9	13	0
12	Kelam Permai	5.319	3.022	8.369	4	19	0	0
13	Sungai Tebelian	23.466	3.996	6.328	0	243	7	0
14	Binjai Hulu	8.462	3.375	1.737	0	4	0	0
	Jumlah	153.797	104.542	150.537	142	2.583	354	7

Sumber: Kementerian Agama Kabupaten Sintang Tahun 2018

Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa pemeluk agama Islam di Kabupaten Sintang menjadi mayoritas dengan jumlah 153.797 jiwa dengan daerah mayoritas pemeluk agama Islam seperti Kecamatan Sintang, Dedai, Sungai Tebelian dan Binjai Hulu. Selanjutnya pemeluk agama Katolik dengan jumlah 104.542 jiwa dengan daerah mayoritas pemeluk agama Katolik seperti Kecamatan Ketungau Hilir, Ketungau Tengah, Ketungau Hulu dan Kayan Hulu. Berikutnya pemeluk agama Kristen dengan jumlah 104.542 jiwa dengan daerah mayoritas seperti Kecamatan Tempunak, Sepauk, Kayan Hilir, Serawai, Ambalau dan Kelam Permai. Selanjutnya pemeluk agama Budha dengan jumlah 2.583 jiwa, selanjutnya pemeluk agama Konghucu berjumlah 354 jiwa, selanjutnya pemeluk agama Hindu berjumlah 142 jiwa dan pemeluk kepercayaan berjumlah 7 jiwa. Dari data tersebut dapat terlihat bahwa terdapat 7 (tujuh) agama maupun kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat di Sintang, sehingga dengan beragamanya komposisi masyarakat dalam konteks agama mencirikan masyarakat yang bersifat heterogen.

Begitu juga dengan keragaman identitas dari segi etnis, terdapat berbagai macam komposisi etnis yang mendiami daerah Provinsi Kalimantan Barat yang tersebar di berbagai macam Kabupaten. Komposisi etnis yang tersebar di Kabupaten Sintang dapat dilihat berdasarkan organisasi kesukuan maupun organisasi kedaerahan yang terdaftar menjadi organisasi legal dan tercatat oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sintang Tahun 2019.

Tabel 2. Daftar Organisasi Kesukuan di Kabupaten Sintang

No	Nama Organisasi
1.	Dewan Adat Dayak (DAD)
2.	Majelis Adat Budaya Melayu (MABM)
3.	Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT)
4.	Pusat Paguyuban Warga Jawa (PUSPAWAJA)
5.	Flores Sumba Timur dan Lor (FLOBAMORA)
6.	Kerukunan Keluarga Kawanua (KKK)
7.	Wadah Komunikasi Masyarakat Batak (WKMB)
8.	Perkumpulan Keluarga Sumatera Barat (PKSB)
9.	Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS)
10.	Sunda

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sintang, 2019

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 10 (sepuluh) organisasi kesukuan yang ada dan telah terdaftar di Kesbangpol Kabupaten Sintang tahun 2019. Namun, berdasarkan observasi terbaru pada tahun 2022 bahwa terdapat beberapa etnis yang mendiami di Sintang memiliki lebih dari satu organisasi kesukuan yang sudah ada sebelumnya. Seperti pada etnis Melayu, selain terdapat organisasi kesukuan seperti Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) juga terdapat organisasi dari etnis Melayu lainnya seperti POM (Persatuan Orang Melayu), begitu juga pada masyarakat etnis Minangkabau terdapat organisasi kesukuan lainnya seperti IKM (Ikatan Keluarga Minang). Sepuluh organisasi kesukuan tersebut mewakili setiap etnis yang mendiami daerah Kabupaten Sintang seperti etnis Dayak, Melayu, Tionghoa, Jawa, warga dari pulau Flores, Sumba, Timor dan Alor, Batak, Minangkabau, Bugis dan Sunda.

Secara keseluruhan, di Kabupaten Sintang didiami oleh masyarakat multietnis yang secara jumlah dapat diperlihatkan dengan adanya berbagai macam organisasi kesukuan yang ada. Hal ini juga didukung dengan hasil observasi yang telah dilakukan bahwa terdapat beberapa etnis secara mayoritas yang mendiami beberapa daerah di Kabupaten Sintang seperti beberapa daerah pedesaan yang menjadi tujuan program transmigrasi seperti etnis Jawa dan etnis Sunda. Sedangkan di daerah perkotaan banyak dihuni oleh berbagai macam etnis seperti etnis Minangkabau, Batak, Bugis dan sebagainya.

Dengan adanya berbagai macam organisasi kesukuan di Kabupaten Sintang menandakan bahwa setiap etnis di daerah ini telah menunjukkan eksistensinya dari segi jumlah hingga mampu mendirikan organisasi sebagai wadah pemersatu dengan berlandaskan kesamaan etnis maupun daerah yang dibawa sejak lahir dan melekat pada setiap individu. Hal ini dapat mempertegas bahwa Sintang menjadi salah satu daerah didiami oleh berbagai macam etnis.

Perolehan Hasil Pemilihan Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018

Pilkada Gubernur tahun 2018 merupakan ajang perhelatan pesta politik dalam usaha menentukan kepala daerah secara langsung. Pilkada secara langsung merupakan sebuah upaya dalam menerapkan sistem demokrasi di berbagai macam daerah. Berakhirnya orde baru menjadikan setiap kelompok masyarakat memiliki banyak kesempatan dalam keikutsertaan partisipasi pada perpolitikan di daerah (Reinnoldt, 2019).

Masyarakat secara langsung dapat menentukan pilihannya pada setiap pasangan calon. Secara historis, pelaksanaan Pilkada secara langsung di Provinsi Kalimantan Barat terkait dengan pemilihan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali. Diawali dengan pelaksanaan Pilkada Gubernur tahun 2007, lalu Pilkada tahun 2012 dan terakhir pelaksanaan Pilkada tahun 2018. Berikut hasil perolehan suara Pilkada Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 di setiap Kecamatan di Sintang.

Tabel 3. Hasil Perolehan Suara Pilkada Kalimantan Barat Tahun 2018

No	Kecamatan	Hasil Perolehan Suara	Hasil Perolehan Suara	Hasil Perolehan Suara
		Pasangan Nomor Urut 1 (satu)	Pasangan Nomor Urut 2 (Dua)	Pasangan Nomor Urut 3 (Tiga)
1	Ambelau	1684	3286	1184
2	Binjai Hulu	1378	1986	2938
3	Dedai	2149	6483	8026
4	Kayan Hilir	2003	11.392	4277
5	Kayan Hulu	3687	7555	2816
6	Kelam Permai	1472	5464	2836
7	Ketungau Hilir	4404	6678	1616
8	Ketungau Hulu	2262	6087	2488
9	Ketungau Tengah	4310	8323	3632
10	Sepauk	6297	12.504	8720
11	Serawai	999	6650	4621
12	Sintang	3128	7987	23.631
13	Sungai Tebelian	2483	5614	8092
14	Tempunak	3679	8159	4700
Jumlah		40.735 (18,64%)	98.168 (44,93%)	79.577 (36,42%)

Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sintang, 2018

Berdasarkan data tersebut didapatkan bahwa pasangan nomor urut 2 (dua) mendapatkan perolehan suara berjumlah 98.168 (44.93%). Pasangan nomor urut 2 (dua) mengungguli pasangan nomor urut 3 (tiga) yang memperoleh suara berjumlah 79.577 (36.42%) dan pasangan nomor urut 1 (satu) memperoleh suara berjumlah 40.735 (18.64%). Hasil rincian berdasarkan tiap kecamatan di Kabupaten Sintang bahwa pasangan nomor urut 3 (tiga) unggul di 4 (empat) kecamatan seperti Kecamatan Sintang, Sungai tebelian, Dedai dan Binjai Hulu. Sedangkan pasangan nomor urut 2 (dua) unggul di 10 Kecamatan seperti Kecamatan Tempunak, Serawai, Sepauk, Ketungau Tengah, Ketungau Hulu, Ketungau Hilir, Kelam Permai, Kayan Hulu, Kayan Hilir dan Ambalau. Sedangkan pada pasangan nomor urut 1 (satu) tidak mendapat keunggulan suara di berbagai daerah Kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang dibandingkan dengan pasangan nomor urut 2 (dua) dan 3 (tiga).

Perolehan suara pada Pilkada tahun 2018 di tiap Kecamatan menggambarkan pilihan politik berdasarkan kesamaan agama. Ketika terdapat perbedaan agama yang dipeluk oleh setiap pasangan calon maka agama dapat menjadi faktor yang penting dalam menentukan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Muhtadi, 2018). Identitas keagamaan memiliki peluang tinggi sebagai bahan politisasi (Setiawan, Scheepers, & Sterkens, 2020). Berdasarkan hasil wawancara dengan kalangan etnis Melayu, dan etnis Jawa bahwa Kecamatan Binjai Hulu, Kecamatan Dedai, Kecamatan Sintang dan Kecamatan Sungai Tebelian menjadi daerah kemenangan pasangan nomor urut 3 (tiga) yang merepresentasikan suara dari umat Islam.

Berdasarkan di atas, didapatkan bahwa dari 14 kecamatan yang berada di Kabupaten, terdapat 4 (empat) Kecamatan yang merupakan daerah mayoritas pemeluk agama Islam. Sedangkan daerah kemenangan pasangan nomor urut 2 berdasarkan tabel 1 (komposisi agama di Kabupaten Sintang berdasarkan tiap Kecamatan) berjumlah 10 kecamatan merupakan daerah mayoritas pemeluk agama Katolik dan Kristen. Pilkada tahun 2018 dipandang sebagai perwakilan kontestasi antara etnis Melayu (Muslim) dan etnis Dayak (Katolik/Protestan) (Qodir dkk, 2022; Setijadi, 2018).

Berdasarkan hasil perolehan suara tersebut dapat dilihat sebagai persaingan politik antara dua kelompok masyarakat yang berlatar belakang identitas. Dua kelompok yang merepresentasikan sebagai kelompok mayoritas berlatar belakang identitas terlibat dalam persaingan politik yang cenderung dapat memecah belah kedua kelompok tersebut. Sehingga dapat mengganggu jalinan sosial yang telah terbentuk sejak lama antar kelompok masyarakat di Kabupaten Sintang. Hal ini patut menjadi perhatian bersama oleh masyarakat. Sikap dewasa dalam berpolitik perlu disadari oleh setiap kelompok masyarakat untuk menghindari berbagai macam konflik hingga kekerasan. Oleh karena itu, masyarakat perlu menyadari setiap jalinan sosial yang sudah terbentuk sejak lama dalam kehidupan sehari-hari.

Kerukunan yang dimaknai dengan suasana kondusif dalam kehidupan sosial, mampu menerima segala macam perbedaan hingga menghadirkan aktivitas bersama antar setiap individu maupun kelompok dapat mencegah perbedaan pilihan politik berdasarkan identitas. Salah satunya aktivitas gotong-royong yang dilakukan antar kelompok masyarakat dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi berbagai macam gesekan sosial yang diakibatkan adanya fenomena politik identitas. Gotong royong yang dilakukan antar kelompok masyarakat setempat dan kelompok masyarakat pendatang mampu memberikan pemahaman sederhana kepada masyarakat bahwa dalam kehidupan sosial antar kelompok saling membutuhkan. Di samping pekerjaan menjadi lebih mudah diselesaikan, di sisi lain juga antar setiap kelompok berbagi pengetahuan dalam bentuk keterampilan. Pemahaman sederhana ini menjadi landasan antar kelompok masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan dan mencegah munculnya berbagai macam konflik hingga kekerasan dikarenakan persaingan politik berdasarkan identitas.

Bentuk Kerukunan dalam Masyarakat Multikultural

Aktivitas gotong-royong

Aktivitas pertama yang mengindikasikan kerukunan dalam masyarakat yaitu aktivitas gotong royong. Seperti yang diungkapkan oleh Koentjaraningrat (1984) bahwa gotong royong adalah istilah lokal di Indonesia yakni kegiatan bersama dalam usaha untuk mencapai hasil yang diharapkan, dan istilah ini berasal dari kata *Gotong* artinya “bekerja” dan *Royong* artinya “bersama”. Sehingga sejak dulu aktivitas yang melibatkan banyak individu untuk bekerja sama sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Secara tradisional, sebagian besar orang Indonesia masih sangat bergantung pada tetangga mereka dan keluarga (Simarmata et al., 2020).

Berdasarkan hasil observasi di Desa Empaci, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang, terdapat aktivitas gotong-royong yang dilakukan antara masyarakat lintas etnis dan agama. Desa Empaci didiami oleh masyarakat multikultural seperti masyarakat asli (etnis Dayak dan etnis Melayu) dan masyarakat pendatang (transmigran) seperti Jawa dan Sunda. Dalam kesehariannya, masyarakat setempat dan masyarakat transmigran sudah saling membaur baik dalam hal interaksi sosial maupun lokasi tempat tinggal. Bahkan tak jarang, antar kelompok masyarakat seperti etnis Dayak dan etnis Jawa sudah saling memahami antar bahasa etnis keduanya, sehingga pada saat melakukan aktivitas gotong royong penggunaan kosa kata yang berasal dari masyarakat etnis Dayak dan etnis Jawa sering digunakan. Hal ini dikarenakan antar masyarakat sudah memahami bahasa masing-masing kelompok etnis lainnya. Berdasarkan wawancara dengan narasumber Syechani dari kalangan masyarakat etnis Jawa diungkapkan bahwa “Kita sudah lama saling mengenal, perbedaan menjadi tidak masalah”. (wawancara dengan Syechani, 12 April 2019).

Masyarakat di Desa Empaci melakukan aktivitas gotong royong dalam bentuk membangun jalan yang menghubungkan antar dua dusun di Desa Empaci. Aktivitas membangun jalan secara gotong-royong yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Empaci sudah dilakukan sejak lama, tidak hanya sekedar pada saat membangun jalan melainkan juga pada berbagai macam aktivitas yang membutuhkan tenaga massa lainnya. Berdasarkan wawancara pada narasumber Syafarudin dari kalangan masyarakat etnis Dayak diungkapkan: "gotong royong sudah dilakukan dari zaman dulu dan sekarang seperti membangun jalan, kerja bakti di ladang, siapa yang memerlukan bantuan ya dibantu". (wawancara dengan Syafarudin, 12 April 2019).

Pada saat sebelum maupun sesudah penyelenggaraan Pilkada Gubernur tahun 2018, aktivitas tersebut masih terjaga untuk tetap dilaksanakan bersama. Beredarnya berita mengenai situasi panas pasca *quick count* Pilkada Gubernur tahun 2018 di luar Kabupaten Sintang yang menyebabkan sebanyak 119 orang diungsikan untuk mengamankan diri (Eddy, 2018). Tidak berpengaruh terhadap hubungan sosial antarkelompok masyarakat di Desa Empaci.

Seperti yang diungkapkan oleh James D. Thomson dan William J. Mc Ewen dalam (Soekanto & Sulistyowati, 2014) bahwa kerukunan mencakup gotong royong dan tolong menolong, sehingga dapat dikatakan bahwa pasca Pilkada Gubernur tahun 2018 hubungan sosial masyarakat multikultural yang bersifat asosiatif (kerukunan) tetap berjalan dengan semestinya. Gotong royong pada masyarakat Indonesia menunjukkan solidaritas yang tinggi (Lukiyanto & Wijayaningtyas, 2020).

Terdapat empat konsep dalam budaya gotong-royong, yakni (1) manusia adalah bagian dari sebuah masyarakat; (2) manusia selalu bergantung sesama manusia dalam segala aspek; (3) manusia harus terus menerus menjaga hubungan baik satu sama lain; dan (4) manusia harus adil satu sama lain (Bintari & Darmawan, 2016). Masyarakat di Desa Empaci sudah menyadari bahwa antar individu maupun kelompok saling membutuhkan dengan individu atau kelompok lainnya, sehingga aktivitas gotong-royong menjadi sebuah kebiasaan di Desa Empaci. Nilai gotong royong yang diwujudkan dalam bentuk perilaku atau tindakan untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama demi kepentingan yang saling menguntungkan bagi masyarakat (Slikkerveer, 2019). Gotong Royong muncul sebagai konstruksi semangat kolektif yang mengikat antar warga dan membuat mereka lebih berkomitmen antara satu dengan yang lain (Winardi, 2020).

Aktivitas tolong menolong

Aktivitas tolong menolong merupakan aktivitas yang lumrah dilakukan dalam masyarakat. Aktivitas ini juga sudah dikenal sejak dulu dan tidak lepas dalam kehidupan sosial. Berdasarkan hasil observasi di Desa Merarai Satu, Kecamatan Sei Tebelian, Kabupaten Sintang ditemukan aktivitas tolong

menolong yang melibatkan masyarakat lintas etnis. Aktivitas tersebut dalam bentuk saling membantu antar tetangga lintas etnis dalam hal menyiapkan acara perayaan seperti *selamatan*, pernikahan dan sebagainya.

Berdasarkan hasil temuan di Desa Merarai Satu, terdapat penyebutan aktivitas tolong menolong dalam rangka mempersiapkan acara pernikahan salah satu warga yaitu *rewang*. *Rewang* diartikan sebagai aktivitas tolong menolong dalam rangka mempersiapkan segala macam keperluan untuk penyelenggaraan pesta pernikahan. Istilah *rewang* digunakan dan diperkenalkan oleh etnis Jawa yang mendiami di Desa Merarai Satu. Pada awalnya, masyarakat Jawa yang mendiami Desa Merarai Satu merupakan warga transmigran. Orang Jawa khususnya masyarakat etnis Jawa dikenal mudah beradaptasi, mampu berasimilasi dengan komunitas lokal tanpa ada konflik agama yang signifikan (Prasojo, Elmansyah, & Haji Masri, 2019).

Rewang dilakukan pada saat salah satu anggota masyarakat setempat mengadakan suatu acara seperti pesta perkawinan, *selamatan* dan sebagainya. Istilah *rewang* tak hanya digunakan oleh warga dari etnis Jawa saja, melainkan juga dari warga etnis lain seperti etnis Dayak, etnis Melayu, etnis Sunda dan sebagainya. Berdasarkan wawancara dengan narasumber Kamaludin dari kalangan masyarakat etnis Melayu mengungkapkan:

“Rewang merupakan istilah dari masyarakat Jawa, istilah itu digunakan di perantauan untuk menjalin keharmonisan dan sekarang tidak hanya masyarakat Jawa yang menggunakan istilah itu tetapi masyarakat di Desa Merarai Satu juga ikut menerapkannya”. (wawancara dengan Kamaludin, 28 April 2019).

Menurut Koentjaraningrat (2002) aktivitas tolong-menolong dinamakan *sambatan*, artinya minta bantuan. Kegiatan tolong-menolong menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan antar warga. Seperti yang diungkapkan oleh William Sumner dalam (Scott, 2012) bahwa faktor internal yang mendorong masyarakat untuk ikut terlibat dikarenakan insting yang terbentuk secara kultural dari adanya pembelajaran sosial. Dengan begitu, pekerjaan berat atau pekerjaan yang membutuhkan tenaga lebih akan cepat terselesaikan. Antar kelompok masyarakat saling memberikan pertolongan tanpa memandang identitas baik etnis maupun agama sehingga membentuk kerukunan, kerukunan mencakup gotong royong dan tolong menolong (James D. Thomson dan William J. Mc Ewen dalam Soekanto & Sulistyowati, 2014). Terdapat perbedaan antara gotong-royong dengan tolong menolong. Gotong-royong bersifat melakukan agenda bersama guna meringankan pekerjaan tersebut dan mengarah adanya kebermanfaatannya yang dirasakan oleh kalangan umum. Sedangkan aktivitas tolong menolong lebih bersifat pada agenda individu yang memerlukan tenaga dari pihak lain guna membantu persiapan dan penyelenggaraan acara tersebut.

Berbagai macam isu SARA yang berkembang dalam masyarakat dapat dibendung dengan berbagai macam kearifan lokal yang mempersatukan setiap

kelompok dalam masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Haba (2012) bahwa kearifan lokal yang dipercaya dan diakui sebagai elemen penting dapat mempererat kohesi sosial antar masyarakat. Setiap kelompok masyarakat yang sudah tinggal bersama, serta telah melahirkan berbagai macam kebiasaan lokal tentunya diharapkan dapat mencegah perpecahan antar kelompok. Relasi sosial antara kelompok etnis yang mendiami Desa Merarai Satu menjadikan suatu bentuk khas dalam hal aktivitas tolong menolong. Kebiasaan dari masyarakat transmigran (etnis Jawa) mampu berkembang dan diterima oleh setiap kalangan etnis lainnya terutama etnis Melayu maupun etnis Dayak. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber Sutarno selaku Ketua Pusat Paguyuban Warga Jawa (Puspawaja) mengatakan: “kehidupan masyarakat Jawa dan masyarakat sekitar berjalan dengan baik di Kabupaten Sintang”. (wawancara dengan Sutarno, 4 April 2019).

Aktivitas kumpul bersama

Aktivitas kumpul bersama dapat didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang melibatkan berbagai macam individu maupun kelompok secara langsung yang disertai adanya kontak dan komunikasi sosial. Dalam rangka mencerminkan sebuah kerukunan dalam masyarakat, aktivitas kumpul bersama menjadi suatu aktivitas yang paling mudah untuk dijumpai di tengah masyarakat multikultural. Hal ini dikarenakan bahwa aktivitas tersebut mudah untuk dilakukan baik dalam suasana nonformal dengan memanfaatkan jalinan pertemanan secara individu yang sudah terjalin, maupun dalam suasana formal memanfaatkan peran dari sebuah organisasi kesukuan dalam menyelenggarakan komunikasi serta dialog antar organisasi kesukuan lainnya.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di berbagai daerah di Kabupaten Sintang seperti Kecamatan Sintang, Kecamatan Kelay Permai, Kecamatan Dedai, dan Kecamatan Sei Tebelian masih banyak ditemukannya aktivitas saling berbaur antar masyarakat multikultural. Sebagaimana yang diungkapkan oleh narasumber Edi dari kalangan masyarakat etnis Tionghoa mengungkapkan: “kumpul bersama atau nyantai bersama telah menjadi kebiasaan masyarakat, adapun perbedaan agama dan suku tidak menghambat dikarenakan kita ingin mencari teman bukan musuh”. (wawancara dengan Edi, 28 April 2019).

Aktivitas kumpul bersama sering dilakukan pada saat menikmati segelas kopi (ngopi). Kebiasaan *ngopi* di kalangan masyarakat mudah ditemui di berbagai macam warung kopi yang semakin menjamur di Kabupaten Sintang. Aktivitas *ngopi* memberikan ruang dialog yang dihasilkan (Pratama, 2017). Lebih lanjut dikatakan bahwa dengan ramainya masyarakat multikultural memiliki kebiasaan tersebut maka memberikan peluang untuk setiap kelompok masyarakat saling berbaur seperti masyarakat Dayak, Tionghoa, Melayu dan sebagainya (Pratama, 2017). Sebagaimana yang diungkapkan oleh narasumber Hermanto selaku Ketua

Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT) Kab. Sintang: “di Sintang setiap etnis hidup saling harmonis baik dari Tionghoa, Dayak, Melayu dan lain-lainnya”. (wawancara dengan Hermanto, 9 April 2019).

Aktivitas kumpul bersama yang dilakukan oleh kalangan masyarakat lintas etnis maupun agama dapat memberikan pengaruh antar setiap kelompok masyarakat maupun antar individu yang berbeda identitas. Sebagaimana yang diungkapkan oleh narasumber Iqbal dari kalangan masyarakat etnis Melayu mengungkapkan: “kumpul bersama bisa membuat kita menjadi lebih kenal dengan orang-orang yang berbeda suku dan agama, jadi tidak perlu anti untuk melakukannya”. (wawancara dengan Iqbal, 24 April 2019).

Tentunya dalam kumpul bersama dihasilkan berbagai macam interaksi serta komunikasi antar setiap kalangan masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Frederic Bath dalam (Sulaiman, 2014) bahwa dengan adanya interaksi sosial antar individu yang berbeda budaya maka perbedaan-perbedaan tersebut diharapkan dapat berkurang dikarenakan dalam interaksi membutuhkan kesatuan tanda dan nilai. Pertemuan dan pembicaraan (dialog) yang dilakukan antaridentitas kelompok maupun individu yang berbeda menghasilkan semacam wadah untuk saling memahami keberagaman. Bahkan, dapat meredam berbagai macam isu atau tidak terprovokasi dengan isu yang dapat memperpecah belah. Dialog sebagai solusi dalam pencegahan konflik antarumat beragama di tengah masyarakat (Engkizar dkk., 2022).

Adanya interaksi sosial serta komunikasi memberikan manfaat di kalangan masyarakat untuk saling mengenal maupun memahami. Kumpul bersama menjadi aktivitas yang dapat mempererat tali persaudaraan antar kelompok maupun individu yang berbeda identitas. Aktivitas kumpul bersama yang dilakukan baik antar individu maupun kelompok yang berbeda identitas dapat membangun citra dalam kehidupan sosial yang dimaknai sebagai suatu cara yang dapat meminimalisir perbedaan. Sedangkan komunikasi yang dilakukan oleh setiap kelompok masyarakat dapat menjembatani antar budaya (Kartikawangi, 2017) serta dengan adanya komunikasi dapat menjaga keharmonisan antarlintas kelompok masyarakat (Nuryadi & Widiatmaka, 2022).

Faktor-Faktor Pendorong Kerukunan dalam Masyarakat Multikultural

Peran organisasi kesukuan

Pada awalnya, organisasi kesukuan menjadi suatu wadah setiap kelompok masyarakat dalam mengembangkan dan melestarikan budaya, adat, bahasa serta menjalin relasi antaranggota kelompok. Hal ini merupakan upaya organisasi kesukuan dalam menunjukkan eksistensi pada tataran kehidupan multikultural. Hadirnya organisasi kesukuan di Kabupaten Sintang seperti Dewan Adat Dayak (DAD), Majelis Adat Budaya Melayu (MABM), Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT) dan Pusat Paguyuban Warga Jawa (Puspawaja) menjadikan berbagai

macam budaya dari tiap etnis dapat dihimpun dalam suatu wadah serta memiliki agenda-agenda pelaksanaan upacara kesukuan.

Organisasi kesukuan memiliki massa yang terdiri dari anggota aktif maupun anggota tak aktif (*simpatisan*). Keanggotaan dari organisasi tersebut diikat dalam bentuk kesamaan etnisitas yang terdiri dari kesamaan bahasa, kesamaan budaya, maupun kesamaan adat. Dengan adanya kesamaan itu mempermudah terjadinya interaksi sosial hingga menjalin sebuah relasi dan pada akhirnya menghasilkan solidaritas sosial antar anggota. Hal ini memiliki keterkaitan dengan peran internal dari organisasi kesukuan seperti melaksanakan agenda silaturahmi pada hari-hari perayaan tertentu dan melaksanakan pelestarian adat dan budaya.

Solidaritas yang terjalin antar anggota dalam sebuah organisasi kesukuan kerap digaungkan tidak hanya sekedar pada agenda-agenda yang bersifat internal melainkan juga pada saat perhelatan politik dimulai seperti Pilkada. Sehingga tak jarang, berbagai macam organisasi tersebut menjadi lumbung suara dari setiap pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada perhelatan Pilkada Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Sintang bahwa pada Pilkada Gubernur tahun 2018 terdapat kader dari organisasi kesukuan tersebut mencalonkan diri, sehingga secara otomatis, organisasi kesukuan tersebut mendeklarasikan diri berupa memberikan dukungan kepada salah satu calon pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada tahun 2018. Begitu juga hasil wawancara dengan ketua Majelis Adat Budaya Melayu Kabupaten Sintang bahwa terdapat semacam usaha yang dilakukan untuk memenangkan salah pasangan calon yang merepresentasikan dari etnis Melayu walaupun tidak dinyatakan secara langsung. Hal ini dapat dikatakan bahwa keberadaan organisasi kesukuan lebih dekat bersentuhan dengan politik praktis (Ismail, 2010). Begitu juga di Kalimantan Barat bahwa berbagai macam institusi etnis memiliki peran dalam fenomena politik identitas etnik (Atok, 2022).

Di sisi lain, organisasi kesukuan dapat menjadi wadah dialog antar organisasi kesukuan lainnya dalam upaya mencapai rekonsiliasi dan perdamaian. Mengingat sejak tahun 1950-an hingga tahun 1999 telah terjadi konflik etnis di Provinsi Kalimantan Barat (Davidson, 2008; Tanasaldy, 2012). Upaya yang dilakukan oleh setiap organisasi kesukuan seperti rutin melakukan pertemuan bersama dengan berbagai macam kelompok masyarakat yang ada di Kabupaten Sintang. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber Jeffray Edward selaku Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kab. Sintang mengatakan: "kita selaku pimpinan dewan adat selalu mengadakan komunikasi kepada yang lainnya jangan sampai hal yang tidak diinginkan terjadi, harapan saya Kabupaten Sintang bisa kita jaga". (wawancara dengan Edward, 1 April 2019).

Di samping melakukan pembicaraan, pertemuan tersebut untuk saling menjalin kesepakatan bersama dan mencegah beredarnya isu-isu SARA dan hoax di kalangan masyarakat pada saat penyelenggaraan Pilkada Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber Ade Kartawidjaya selaku Ketua Majelis Dewan Adat Melayu (MABM) Kab. Sintang:

“Kehidupan etnis di Kabupaten Sintang lebih harmonis dikarenakan tidak adanya konflik etnis yang terjadi seperti di kabupaten lainnya, dan ini merupakan tugas pemimpin untuk selalu menenangkan dan tidak memprovokasi”. (wawancara dengan Kartawidjaya, 12 Maret 2019).

Organisasi kesukuan dapat diharapkan menjadi sebuah wadah pembentukan kerukunan antar etnis yang ada begitu juga pada kerukunan pada umat beragama (Ismail, 2010). Hadirnya organisasi kesukuan di Sintang merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya konflik berbau SARA. Berbagai macam permasalahan yang timbul dalam kalangan masyarakat multikultural tidak bisa disepelekan. Permasalahan kecil yang menyangkut identitas rentan menjadi masalah besar pada saat kalangan pihak dalam setiap kelompok masyarakat tidak memberikan perhatian. Politik identitas digunakan untuk mempertegas perbedaan antara ‘kami dan mereka’, ‘saya dan kamu’ hingga pada bentuk ekstremnya langsung mengarah pada identitas seperti Jawa dan luar Jawa atau Islam dan Kristen (Haboddin, 2012). Hal seperti ini memberikan tantangan kepada setiap organisasi kesukuan dalam memberikan edukasi mengenai wawasan multikultural pada tiap anggota.

Asas kebermanfaatan bersama

Asas kebermanfaatan bersama menjadi salah satu faktor yang menghadirkan kerukunan dalam keberagaman masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara terhadap masyarakat lintas etnis di Sintang bahwa pemikiran sederhananya semakin banyak warga ikut bekerja sama, maka semakin cepat pekerjaan itu selesai, sehingga pola hidup rukun merupakan landasan awal untuk mendapatkan asas kebermanfaatan antar setiap kelompok masyarakat. Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara terhadap tokoh masyarakat (DAD, MABM, MABT dan Puspawaja) secara historis bahwa Sintang merupakan daerah yang tidak memiliki catatan konflik antarkelompok dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Kalimantan Barat.

Namun, untuk menghadirkan asas kebermanfaatan bersama perlu dilatarbelakangi adanya sebuah aktivitas yang dilakukan secara sadar dan bersama guna menghadirkan asas tersebut bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas kebermanfaatan bersama yang dirasakan oleh setiap kalangan masyarakat termanifestasikan dalam bentuk berbagai macam kerja sama. Kerja sama merupakan suatu usaha yang dilakukan bersama antara individu maupun kelompok (Yani, 2019), seperti dalam bentuk aktivitas gotong-royong, tolong menolong dan berbagai macam aktivitas yang melibatkan kedua kelompok

atau lebih yang berbeda identitas. Berbagai macam kegiatan yang memiliki dampak kebermanfaatan bersama secara tidak langsung dapat mengurangi stereotip yang berkembang pada setiap kelompok masyarakat. Walaupun tidak dapat menghapus stereotip sepenuhnya, asas tersebut dapat menjadi jalan tengah dalam membangun sebuah wawasan kebangsaan bagi setiap kelompok masyarakat yang sedang terlibat.

Terlebih dengan adanya keberagaman etnis diarahkan dalam hubungan sosial yang bersifat asosiatif. Berbagai macam kelompok masyarakat yang sudah memahami akan asas kebermanfaatan bersama tentunya tidak ingin dengan adanya dampak politik identitas yang mengganggu hubungan sosial yang sudah terjalin. Seperti yang diungkapkan oleh Afala (2018), pertama, Negara Indonesia yang merupakan negara plural dengan beragama etnis, suku, agama dan bahasa merupakan potensi yang mewarnai dan membentuk perilaku politik kontemporer kini, kedua, Indonesia merupakan negara yang masih berada dalam proses transisi maupun konsolidasi menuju demokrasi. Kehadiran demokrasi menjadi struktur peluang politik yang rentan untuk dibajak oleh kelompok manapun. Ketiga, isu mengenai politik identitas pada dasarnya menandai adanya praktik politik kaum bawah kelompok (terpinggirkan) yang dilakukan untuk melalui perjuangan dan perlawanan terhadap berbagai bentuk diskriminasi. Keempat, gagalnya narasi besar (*grand narrative*) untuk menemukan format kesejahteraan menjadi pemicu lahirnya politik identitas. Politik identitas dapat merusak keharmonisan masyarakat jika dalam kehidupan sosial antarkelompok masyarakat tidak adanya suatu interaksi yang saling menguntungkan.

Dengan demikian, asas kebermanfaatan bersama menjadi salah satu unsur yang dapat menjaga kerukunan sosial yang sudah terjalin dalam masyarakat multikultural. Asas kebersamaan yang telah dipahami oleh masyarakat dapat menjadi alasan bagi setiap kelompok masyarakat untuk tetap hidup bersama dalam bingkai kehidupan harmonis dan mencegah berbagai macam konflik hingga kekerasan. Hal ini menjadi modal sosial dalam masyarakat ketika beredarnya berbagai macam isu SARA yang dapat mengganggu kerukunan, khususnya pada saat perhelatan Pilkada. Masyarakat telah sadar untuk menjaga kerukunan dalam masyarakat multikultural untuk tidak terpancing dengan berbagai macam isu tersebut.

Saling mengenal dan saling memahami

Masyarakat di Sintang sudah terbiasa dengan berbagai keberagaman etnis maupun agama, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Jarot Winarno selaku Bupati Sintang:

“Sejak dulu di Kabupaten Sintang sudah banyak para pendatang dari pulau lain datang dan menetap di Kabupaten Sintang. Hal ini membentuk semacam proses belajar bagi masyarakat yang mendiami di berbagai macam Kecamatan maupun Desa di Kabupaten Sintang dalam mengenal berbagai macam etnis serta budaya”. (wawancara dengan Winarno, 8 Mei 2019).

Senada dengan hasil wawancara tersebut, menurut narasumber Askiman selaku Wakil Bupati Sintang mengatakan: “secara tidak sadar membantu masyarakat membentuk wawasan kebangsaan bahwa Indonesia merupakan negara multietnis, agama, bahasa serta berbagai macam budaya”. (wawancara dengan Askiman, 12 Maret 2019).

Berdasarkan hasil observasi di beberapa Desa yang menjadi daerah transmigrasi seperti Desa Merarai Satu, Desa Empaci, maupun wilayah Kecamatan Sintang bahwa yang mendiami daerah-daerah tersebut tidak hanya didiami oleh satu atau dua kelompok etnis saja. Umumnya etnis yang tergolong sebagai transmigran di daerah-daerah tersebut merupakan berasal dari Pulau Jawa. Desa Merarai Satu dan Desa Empaci didiami oleh beberapa masyarakat lintas etnis seperti etnis Dayak, etnis Jawa, etnis Sunda maupun etnis Melayu. Dengan adanya modal tersebut masyarakat antar lintas etnis akan saling mengenal yang dilatarbelakangi adanya interaksi sosial. Interaksi sosial menjadi kunci dari adanya kehidupan sosial dan melahirkan kehidupan bersama (Young & Mack, 1959).

Hasil wawancara kepada tokoh masyarakat dan kalangan masyarakat lintas etnis bahwa politik identitas merupakan suatu keniscayaan dalam masyarakat, namun tak perlu digaungkan pada saat berinteraksi dalam kehidupan sosial, cukup dibahas dalam “kelompok sendiri” atau secara pribadi individu masing-masing. Karena jika itu digaungkan maka dapat mengganggu keharmonisan dikarenakan adanya sentimen politik masyarakat yang berdasarkan identitas baik etnis maupun agama. Politik identitas menjadi hal yang lumrah dalam masyarakat plural, sehingga akan menjadi masalah jika terjadi diskriminasi terhadap salah satu kelompok masyarakat (Kiftiyah, 2019).

Berbagai macam perbedaan identitas yang ada dalam kehidupan sosial menjadi sebuah fakta yang tidak dapat dihindarkan. Setiap kelompok masyarakat perlu membiasakan diri dalam usaha saling memahami, saling menghormati, bahkan saling mengenal (berinteraksi) karena dengan adanya interaksi sosial merupakan langkah awal dalam membangun hubungan sosial guna mencegah serta meminimalisir berbagai macam perpecahan dalam masyarakat multikultural. Adanya sikap saling menerima, mempercayai, menghormati dan menghargai dengan memaknai kebersamaan merupakan bentuk dari cerminan sebuah kerukunan (Rusydi & Zolehah, 2018).

Dengan adanya proses belajar masyarakat dalam hal saling mengenal dan memahami maka akan membentuk sikap toleransi. Toleransi dilakukan tak hanya pada saat berinteraksi, namun juga pada saat berpolitik. Menurut Levitsky & Ziblatt (2019) saling toleransi merujuk selama para pesaing menaati aturan konstitusional yang berlaku maka hak untuk bersaing mendapatkan kekuasaan berlaku setara antar setiap pesaing. Ketika antar kelompok masyarakat menyadari akan timbulnya persaingan antar kelompok dalam usaha memenangkan perwakilan dari setiap kelompok pada Pilkada Provinsi Kalimantan Barat tahun

2018, secara otomatis masyarakat mulai memahami makna keberagaman. Tak hanya pada keberagaman antar kelompok, keberagaman tersebut juga hadir pada pilihan politik setiap masyarakat yang berlandaskan pada identitas. Karena, jika antar kelompok masyarakat tidak berusaha saling memahami dengan sadar setiap pilihan politik masyarakat, maka akan mengakibatkan ketidakharmonisan sosial mengingat masalah ketidakharmonisan sosial telah menjadi sebuah perhatian serius sejak pemilihan presiden 2019 di Kalbar dan wilayah Indonesia lainnya (Jonkers, 2019).

SIMPULAN

Kerukunan menjadi konsep ideal bagi masyarakat multikultural dikarenakan dengan adanya kerukunan menjadikan masyarakat dengan multiidentitas dapat hidup bersama serta bekerja sama. Berbagai macam aktivitas bersama yang dilakukan antar masyarakat multi etnis seperti tercermin pada aktivitas gotong-royong yang menandakan antar masyarakat sudah memahami untuk saling bekerja sama tanpa memandang identitas yang melekat. Begitu juga pada aktivitas tolong menolong yang menjadi aktivitas yang paling lumrah ditemui dalam kehidupan masyarakat dengan berlandaskan bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa manusia lainnya serta aktivitas kumpul bersama yang menjadi aktivitas yang paling mudah di temukan serta dapat melahirkan dialog antar masyarakat.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi kerukunan dalam masyarakat multikultural seperti adanya peran organisasi kesukuan dalam mengambil langkah bijak terhadap berbagai macam isu sara pada saat penyelenggaraan maupun pasca Pilkada Gubernur tahun 2018, adanya asas kebermanfaatn bersama yang sudah dirasakan oleh masyarakat multikultural di Kabupaten Sintang yang menjadi modal sosial dalam menciptakan kerja sama antar masyarakat tanpa memandang latar belakang identitas serta sudah saling mengenal dan memahami antarmasyarakat multikultural sehingga dengan beredarnya isu SARA tidak terlalu berpengaruh memperpecah jalinan sosial yang telah terbentuk.

Fenomena politik identitas sebagai suatu keniscayaan di kalangan masyarakat multikultural, namun kalangan masyarakat sudah memahami hal-hal yang berbau SARA tidak dimunculkan saat menjalani kehidupan sehari-sehari terutama pada saat berhubungan sosial terhadap kelompok masyarakat yang berbeda identitas. Hal ini menjadi menarik dikarenakan ditengah beredarnya isu identitas dalam perhelatan Pilkada di berbagai macam daerah multikultural, setiap kelompok masyarakat mulai memahami hal-hal mengenai perbedaan pilihan politik berdasarkan identitas tidak menjadi pemecah persatuan dikarenakan adanya sikap saling toleransi. Fenomena politik identitas yang terjadi di masyarakat dapat dilihat sebagai bentuk proses belajar dalam usaha

memahami keberagaman jika dalam kesehariannya kerukunan kelompok masih terjaga dengan baik. Dengan begitu kerukunan antara masyarakat multikultural dapat tercipta dan terjaga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada akhirnya, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada berbagai macam pihak yang menjadi narasumber dalam penelitian ini seperti Bupati Kabupaten Sintang, Wakil Bupati Kabupaten Sintang, Ketua Dewan Adat Dayak (DAD), Ketua Majelis Adat Budaya Melayu (MABM), Ketua Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT) dan Ketua Pusat Paguyuban Warga Jawa (Puspawaja), kalangan masyarakat etnis Dayak, etnis Melayu, etnis Tionghoa dan etnis Jawa dan berbagai macam instansi terkait seperti Kementerian Agama (Kemenag), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di Kabupaten Sintang yang telah memberi banyak informasi dan berbagai macam data berkaitan dengan penelitian ini. Begitu juga dengan para peneliti sebelumnya yang telah banyak menghadirkan berbagai macam hasil penelitian guna mendukung tulisan ini.. Serta tak lupa kepada pengelola jurnal *Harmoni* (editor, tim redaksi dan reviewer) yang telah memberikan masukan dan kritikan yang membangun kepada penulis sehingga tulisan ini layak untuk diterbitkan. Besar harapan penulis, semoga tulisan ini bermanfaat bagi siapa pun untuk dapat memaknai kerukunan masyarakat multikultural sebagai sebuah realitas ideal yang patut dijaga.

DAFTAR ACUAN

- Afala, L. M. (2018). *Politik Identitas di Indonesia*. Malang: UB Press.
- Atok, K. (2022). Budaya kekerasan dan konflik etnisitas di Kalimantan Barat Periode 1966-2000. *Borneo Review*, 1(1), 46–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.52075/br.v1i1.81>
- Bazzi, S., & Gudgeon, M. (2021). The political boundaries of ethnic divisions. *American Economic Journal: Applied Economics*, 13(1), 235–266. <https://doi.org/DOI: 10.1257/app.20190309>
- Bintari, P. N., & Darmawan, C. (2016). Peran pemuda sebagai penerus tradisi sambatan dalam rangka pembentukan karakter gotong royong. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25(1), 57-76. <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/jpis.v25i1.3670>
- Buchari, S. A. (2014). *Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Davidson, J. S. (2008). *From Rebellion to Riots: Collective Violence on Indonesian Borneo*. Madison: WI: University of Wisconsin Press.
- Eddy, G. (2018). Ricuh Hasil Pilgub Kalbar di Landak, 119 Warga Mengungsi. April 29, 2023. <https://daerah.sindonews.com/berita/1317697/174/ricuh-hasil-pilgub-kalbar-di-landa-k-119-warga-mengungsi>
- Engkizar, E., Kaputra, S., Mutathahirin, M., Syafril, S., Arifin, Z., & Kamaluddin, M. (2022). Model pencegahan konflik antarumat beragama berbasis kegiatan masyarakat. *Harmoni*, 21(1), 110–129. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v21i1.603>
- Gerintya, S. (2018, May 24). *Ada Tiga Daerah Paling Rawan pada Pilkada 2018*. April 19, 2023. <https://tirto.id/ada-tiga-daerah-paling-rawan-pada-pilkada-2018-cK2y>
- Haba, J. (2012). Etnisitas, hubungan sosial dan konflik di Kalimantan Barat. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 14(1), 31–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jmb.v14i1.86>
- Haboddin, M. (2012). Menguatnya politik identitas di ranah lokal. *Journal of Government and Politics*, 3(1), 109–126. <https://doi.org/10.18196/jgp.2012.0007>
- Hamilton, A. B., & Finley, E. P. (2019). Qualitative methods in implementation research: An introduction. *Psychiatry Research*, 280. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2019.112516>
- Hanan, D. (2020). Identity politics in the 2019 Indonesian general elections: Its significance and limitation. *Jurnal Wacana Politik*, 5(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/jwp.v5i1.27710>
- Hasanah, K. (2018). Ethnicity issues as a political mobilization instrument of Cornelis MH in 2007 West Kalimantan direct elections. *International Journal of English Literature and Social Sciences*, 3(2), 266–272. <https://doi.org/10.22161/ijels.3.2.23>
- Huntington, S. P. (1996). *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. New York: Simon & Schuster. <http://www.simonsays.com>
- Ismail, A. (2010). Refleksi pola kerukunan umat beragama (fenomena keagamaan di Jawa Tengah, Bali Dan Kalimantan Barat). *Jurnal Analisa*, 17(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.18784/analisa.v17i2.36>
- Jonkers, P. (2019). How to respond to conflicts over value pluralism? *Journal of Nationalism Memory and Language Politics*, 13(2), 183–204. <https://doi.org/10.2478/jnmlp-2019-0013>

- Kartikawangi, D. (2017). Symbolic convergence of local wisdom in cross-cultural collaborative social responsibility: Indonesian case. *Public Relations Review*, 43(1), 35–45. <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2016.10.012>
- Kiftiyah, A. (2019). Upaya rekonsiliasi politik identitas pasca pelaksanaan pemilu 2019 di Indonesia. *Jurnal Analis Kebijakan*, 3(1). <http://jurnalpusaka.lan.go.id/index.php/jurnalpusaka/article/view/59>
- Koentjaraningrat. (1984). *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Koentjaraningrat. (2002). *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2019). *Bagaimana Demokrasi Mati*. Jakarta: Gramedia.
- Lubis, R. (2020). *Merawat Kerukunan: Pengalaman di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Lukiyanto, K., & Wijayaningtyas, M. (2020). Gotong Royong as social capital to overcome micro and small enterprises' capital difficulties. *Heliyon*, 6(9). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04879>
- Muhtadi, B. (2018). Politik identitas dan mitos pemilih rasional. *Maarif*, 13(2), 68–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.47651/mrf.v13i2.23>
- Nassaji, H. (2020). Good qualitative research. *Language Teaching Research*, 24(4), 427–431. <https://doi.org/10.1177/1362168820941288>
- Nuryadi, M. H., & Widiatmaka, P. (2022). Harmonisasi antar etnis dan implikasinya terhadap ketahanan wilayah di Kalimantan Barat pada era Society 5.0. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 28(1), 101-119. <https://doi.org/10.22146/jkn.73046>
- Prasojo, Z. H., Elmansyah, E., & Haji Masri, M. S. (2019). Moderate Islam and the social construction of multi-ethnic communities. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 9(2), 217–239. <https://doi.org/10.18326/ijims.v9i2.217-239>
- Pratama, G. R. (2017). *Ngupi*. Institut Seni Indonesia, Yogyakarta.
- Qodir, Z., Jubba, H., & Hidayati, M. (2022). Contesting ethnic and religious identities in the 2019 Indonesian elections: Political polarization in West Kalimantan. *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies*, 29(1). <https://doi.org/DOI:10.36712/sdi.v29i1.12940>
- Rashid, Y., Rashid, A., Warraich, M. A., Sabir, S. S., & Waseem, A. (2019). Case study method: A Step-by-Step guide for business researchers. *International Journal of Qualitative Methods*, 18. <https://doi.org/10.1177/1609406919862424>
- Reinnoldt, C. (2019). *Asserting Indigenous Identity to Substantiate Customary Forest Claims: A Case Study of the Dayaks of West Kalimantan, Indonesia*. https://scholarship.claremont.edu/cmc_theses/2279

- Rusdiono, Patriani, I., & Padilah, A. H. (2022). Dinamika proses promosi jabatan dilingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. *Journal of Social And Policy Issue*, 2(4). <https://doi.org/10.35308/xxxxx>
- Rusydi, I., & Zolehah, S. (2018). Makna kerukunan antar umat beragama dalam konteks keislaman dan keindonesian. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 1(1), 170–181. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1161580>
- Sada, C., Alas, Y., & Anshari, M. (2019). Indigenous people of Borneo (Dayak): development, social cultural perspective and its challenges. *Cogent Arts and Humanities*, 6(1). <https://doi.org/10.1080/23311983.2019.1665936>
- Scott, J. (2012). *Teori Sosial (Masalah-Masalah Pokok Dalam Sosiologi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Setiawan, T., Scheepers, P., & Sterkens, C. (2020). Applicability of the social identity model of collective action in predicting support for interreligious violence in Indonesia. *Asian Journal of Social Psychology*, 23(3), 278–292. <https://doi.org/10.1111/ajsp.12397>
- Setijadi, C. (2018). *West Kalimantan Gubernatorial Election 2018: Identity Politics Proves Decisive*.
- Simarmata, N., Yuniarti, K. W., Riyono, B., & Patria, B. (2020). Gotong royong in Indonesian history. *Digital Press Social Sciences and Humanities*, 5, 00006. <https://doi.org/10.29037/digitalpress.45341>
- Slikkerveer, L. J. (2019). *Gotong Royong: An Indigenous Institution of Communalism and Mutual Assistance in Indonesia*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-05423-6_14
- Soekanto, S., & Sulistyowati, B. (2014). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sulaiman, S. (2014). Nilai-nilai kerukunan dalam tradisi lokal (Studi interaksi kelompok umat beragama di Ambarawa, Jawa Tengah). *Jurnal Harmoni*, 13(1), 65–79.
- Suryadi, K. (2017). *Menak Senayan: Arsitek Komunikasi Politik Indonesia*. Bandung: Pustaka Jaya.
- Syahrin, A. A., Suryadi, K., & Komariah, S. (2019). The ethnic revival of Malay in the governor elections 2018 of West Kalimantan Province. *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 35(2), 440–449. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v35i2.5061>
- Talitha, T., Firman, T., & Hudalah, D. (2020). Welcoming two decades of decentralization in Indonesia: A regional development perspective. *Territory, Politics, Governance*, 8(5), 690–708. <https://doi.org/10.1080/21622671.2019.1601595>

- Tanasaldy, T. (2007). Ethnic Identity Politics in West Kalimantan. In H. S. Nordholt & G. Van Klinken (Ed.), *Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-Suharto Indonesia*, Leiden: KITLV Press.
- Tanasaldy, T. (2012). *Regime Change and Ethnic Politics in Indonesia: Dayak Politics of West Kalimantan*. BRILL.
- Winardi, U. N. (2020). Gotong royong and the transformation of Kampung Ledok Code, Yogyakarta. *City and Society*, 32(2), 375–386. <https://doi.org/10.1111/ciso.12291>
- Yani, H. (2019). Harmony of multicultural community interaction. *International Journal on Social Science, Economics and Art*, 9(3), 115-127. <https://doi.org/https://doi.org/10.35335/ijosea.v9i3.33>
- Young, K., & Mack, R. W. (1959). *Sociology and social life*. New York: American Book Company.
- Zulfauzan, R. (2020). *Teori etnisitas: Perdebatan Dan Relasinya Dengan Rational Choice Theory*. Bandung: Media Sains Indonesia.

Wawancara;

- Edi. (2019, April 28). Personal Interview.
- Edward. (2019, April 1). Personal Interview.
- Hermanto (2019, April 9). Personal Interview.
- Iqbal. (2019, April 24). Personal Interview.
- Kamaludin. (2019, April 28). Personal Interview.
- Kartawidjaya (2019, March 12) Personal Interview.
- Sutarno. (2019, April 4). Personal Interview.
- Syafarudin. (2019, April 12). Personal Interview.
- Syechani. (2019, April 12). Personal Interview.
- Winarno. (2019, May 8). Personal Interview.